



PROTEKSI ISI PROPOSAL

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi proposal ini dalam bentuk apapun kecuali oleh pengusul dan pengelola administrasi pengabdian kepada masyarakat

PROPOSAL PENELITIAN 2024

Rencana Pelaksanaan Penelitian: tahun 2024 s.d. tahun 2024

1. JUDUL PENELITIAN

Kemitraan Multipihak Berbasis ICT Sebagai Strategi Pengembangan Kapasitas Badan Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kalimantan

Bidang Fokus	Tema	Topik (jika ada)	Prioritas Riset
Sosial Humaniora, Pendidikan, Seni, Dan Budaya	Pembangunan dan penguatan sosial budaya	Tatakelola dan pemerintahan	Green Economy

Rumpun Ilmu Level 1	Rumpun Ilmu Level 2	Rumpun Ilmu Level 3
ILMU SOSIAL HUMANIORA	ILMU POLITIK	Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll)

Skema Penelitian	Strata (Dasar/Terapan/ Pengembangan)	Nilai SBK	Target Akhir TKT	Lama Kegiatan
Penelitian Fundamental - Reguler	Riset Dasar	150.000.000	3	1 Tahun

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Jenis	Program Studi/Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta
RUSDIYANTA 0317076801 Ketua Pengusul Universitas Budi Luhur	Dosen	Ilmu Hubungan Internasional	Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan penelitian, Melakukan pengumpulan data, Melakukan analisis data, Menyusun laporan penelitian, Menulis artikel.	5984778
BAMBANG PUJIYONO 0026087101 Anggota Universitas Budi Luhur	Dosen	Ilmu Hubungan Internasional	Melakukan pengumpulan data, Melakukan analisis kaitan kemitraan multipihak dengan pengembangan kapasitas; Menyusun laporan penelitian; Menulis artikel	5978004
SAMSINAR 0329098202 Anggota Universitas Budi Luhur	Dosen	Sistem Informasi	Mengumpulkan data; Menganalisis peran ICT sebagai instrumen kemitraan; Menyusun Laporan; Menulis artikel	6049803
TULUS YUNIASIH 0324088401 Anggota Universitas Budi Luhur	Dosen	Ilmu Hubungan Internasional	Melakukan pengumpulan data; Melakukan analisis data; Melakukan penyusunan laporan penelitian; Menulis artikel	5984237
MUHAMMAD NADHIEF MAHENDRA 2242500318 Mahasiswa Universitas Budi Luhur	Mahasiswa	Ilmu Hubungan Internasional	Membantu pengurusan ijin; Membantu mengumpulkan data; Membantu administrasi	-

Nama, Peran	Jenis	Program Studi/Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta
SEPTIAN EKO PURNOMO 2212510297 Mahasiswa Universitas Budi Luhur	Mahasiswa	Sistem Informasi	Membantu pengurusan ijin; Membantu pengumpulan data; Membantu administrasi	-

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (Jika Ada)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra	Dana
-------	------------	------

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian	Keterangan
1	Artikel di Jurnal	Artikel di Jurnal Bereputasi Internasional	Accepted/Published	Journal of Borderlands Studies/https://www.tandfonline.com/journals/rjbs20/Taylor & Francis

5. ANGGARAN

Rencana Anggaran Biaya penelitian mengacu pada PMK dan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku.

Total RAB 1 Tahun Rp149.992.000,00

Tahun 1 Total Rp112.180.000,00

Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Pengumpulan Data	ATK	Paket ATK	Paket	1	2.000.000	2.000.000
Pelaporan Hasil Penelitian dan Luaran Wajib	Biaya Publikasi artikel di Jurnal Bereputasi Nasional	Biaya publikasi artikel Sinta 2	Paket	1	418.000	418.000
Pengumpulan Data	Penginapan	Sewa hotel di Pontianak	OH	5	1.125.000	5.625.000
Sewa Peralatan	Kendaraan	Sewa mobil untuk survei di kawasan perbatasan 2x	OK (kali)	4	1.100.000	4.400.000
Pengumpulan Data	Penginapan	Sewa Hotel di Tanjung Selor	OH	5	1.507.000	7.535.000
Pengumpulan Data	Tiket	2 orangx2 tiket Jakarta-Tanjung Selor PP	OK (kali)	4	4.057.000	16.228.000
Pengumpulan Data	HR Petugas Survei	6 orangx30 informanx 8000	OH/OR	180	8.000	1.440.000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	6 orang x 10 hari x 50000	OH	60	50.000	3.000.000
Pengumpulan Data	Transport	2 orang Transport Lokal di Pontianak dan Tanjung Selor @250000	OK (kali)	10	250.000	2.500.000
Pengumpulan Data	Transport	Transport lokal di Jakarta 3 orangx5x256000	OK (kali)	15	256.000	3.840.000
Pelaporan Hasil Penelitian dan Luaran Wajib	Biaya Publikasi artikel di Jurnal	Biaya Publikasi artikel di Jurnal Scopus Q3	Paket	1	14.500.000	14.500.000

Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
	Bereputasi Internasional					
Pelaporan Hasil Penelitian dan Luaran Wajib	Biaya Pendaftaran KI	Biaya pengurusan HKI	Paket	1	550.000	550.000
Pengumpulan Data	Tiket	2 orangx2 tiket Jakarta-Pontianak PP	OK (kali)	4	2.781.000	11.124.000
Pelaporan Hasil Penelitian dan Luaran Wajib	Biaya konsumsi rapat	biaya konsumsi penyusunan laporan, artikel dan buku 5x6 orgx50.000	OH	30	50.000	1.500.000
Pelaporan Hasil Penelitian dan Luaran Wajib	Biaya penyusunan buku termasuk book chapter	Biaya penerbitan buku	Paket	1	5.500.000	5.500.000
Analisis Data	Biaya konsumsi rapat	4 orangx5 harix50000	OH	20	50.000	1.000.000
Analisis Data	Penginapan	2 kamarx3 harix730000	OH	6	730.000	4.380.000
Analisis Data	Uang Harian	4 orangx3 harix370000	OH	12	370.000	4.440.000
Pengumpulan Data	Uang Harian	6 orang x 10 hari x 370.000	OH	60	370.000	22.200.000

B. RINGKASAN

Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan

[Pengelolaan kawasan perbatasan merupakan masalah yang sangat kompleks. Ada beberapa pendekatan dalam pengelolaan kawasan perbatasan, pendekatan keamanan, pendekatan kesejahteraan dan pendekatan lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat setempat. Untuk itu dituntut kapasitas badan pengelola yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Pengembangan kapasitas melalui kemitraan multipihak berbasis ICT menjadi inovasi kebijakan yang *agile* tanpa menabrak peraturan. Mengingat BNPP sangat terbatas kewenangannya hanya sebagai badan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas (KISS). Ada masalah kesenjangan antara kompleksitas masalah pengelolaan kawasan perbatasan dengan kemampuan BNPP dalam mengelola.

Urgensi penelitian ini adalah strategi kemitraan multipihak dengan memanfaatkan ICT mendorong berkembangnya kapasitas organisasi tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Organisasi mampu menjalankan fungsi-fungsinya, kinerja meningkat dan masyarakat kawasan perbatasan sejahtera, aman, dan lingkungan hidup lestari. Kemitraan multipihak dapat melengkapi kekurangan sumberdaya, pertukaran data, transfer teknologi serta memotivasi pihak internal agar mempunyai komitmen tinggi demi kesuksesan program dan proyek, pembuatan keputusan, penetapan tujuan organisasi, maupun penetapan sasaran strategis. ICT dapat menjadi instrumen mempermudah kemitraan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena kawasan perbatasan Kalimantan dan kapasitas BNPP; menganalisis makna kemitraan multipihak; mengidentifikasi manfaat ICT; menganalisis kausalitas kemitraan multipihak dengan meningkatnya kapasitas BNPP dalam menjalankan fungsinya.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis strategi pengembangan kapasitas melalui kemitraan multipihak dengan memanfaatkan ICT. Pengumpulan data dilakukan dengan survei lapangan, studi dokumen dari sumber-sumber yang valid, wawancara mendalam kepada informan dari BNPP, kementerian dan lembaga-lembaga mitra, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Teknik analisis data kualitatif dilakukan menggunakan model Miles, Huberman & Saldana yakni dengan melakukan pengumpulan data, display data, reduksi data, dan verifikasi data/penyimpulan.

Luaran penelitian menghasilkan model pengembangan kapasitas organisasi melalui kemitraan multi-pihak berbasis ICT. Model ini memiliki kesiapan teknologi TKT 1. Luaran artikel dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi

Scopus 3 yakni Journal of Borderlands Studies, artikel jurnal nasional Sinta 2 serta buku ber-ISBN.

.]

C. KATA KUNCI

Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

[Kemitraan; ICT; Kapasitas; BNPP; Perbatasan]

D. PENDAHULUAN

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang memuat, latar belakang, rumusan permasalahan yang akan diteliti, pendekatan pemecahan masalah, state-of-the-art dan kebaruan, peta jalan (road map) penelitian setidaknya 5 tahun. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.

[1. Latar Belakang

Masalah-masalah kawasan perbatasan terlalu kompleks, beragam dan rumit menjadi tantangan besar untuk ditangani oleh satu individu atau organisasi. Untuk mengatasi kompleksitas masalah, sering kali memerlukan kemitraan multipihak (KMP) karena tidak ada satu pun aktor (seperti dunia usaha atau pemerintah) yang mampu menyelesaikannya sendirian (1–3). Kemitraan ini biasanya terbentuk ketika masalah sosial dianggap terlalu kompleks dan beragam untuk satu organisasi atau sector penanganannya sendiri, sehingga memerlukan aksi bersama lintas sektor.(4,5). Bersifat lintas sektor karena kemitraan memiliki lebih dari satu mitra dari masing-masing sektor bisnis, pemerintah, dan nirlaba. Kemitraan multi-multipihak besar dapat membangun kapasitas dengan mengembangkan dan memanfaatkan beragam perspektif dan sumber daya dari organisasi mitra menjadi pendekatan inovatif yang semakin populer untuk mengatasi masalah publik (6). Kemitraan multi-pihak dirancang untuk mengatasi dan memprioritaskan masalah sosial, sehingga sulit untuk menentukan nilai proposisi untuk setiap mitra tertentu.(7).

Kemitraan multi-pihak menjadi pendekatan yang makin populer untuk mengatasi masalah-masalah social. Karena kemitraan multipihak dapat meningkatkan kapasitas dengan cara mengembangkan dan memanfaatkan berbagai macam perspektif dan sumber daya organisasi mitra. Dengan bergabung dalam kemitraan multi-pihak, dan membantu mencapai tujuan keberlanjutan kolaboratif. Ada relasi antara hubungan kemitraan dengan hasil nilai tambah kemitraan baik kuantitatif dan kualitatif.(8) Menurut Valdellon (2017), banyak manfaat atau nilai tambah berusaha untuk mengkonfirmasi dan mengartikulasikan bahwa kemitraan secara keseluruhan menghasilkan lebih dari apa yang seharusnya dihasilkan dari organisasi mitra yang beroperasi secara independen. (9).

BNPP memiliki keterbatasan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan perbatasan. Menurut UU No.43/2008 dan Perpres No.12/2010, BNPP merupakan lembaga struktural dan permanen dengan tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; menetapkan rencana kebutuhan anggaran; mengoordinasikan pelaksanaan; dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Tugas tersebut mencerminkan fungsi manajerial tanpa kewenangan eksekusi. BNPP sekedar lembaga koordinasi, integrasi, sinergi, sinkronisasi (KISS) kebijakan. Pelaksana pembangunan kawasan perbatasan adalah lembaga teknis sesuai dengan tupoksinya. Dengan demikian, BNPP tidak memiliki kapasitas perencanaan, teknis, dan evaluasi. Kompleksitas masalah pengelolaan kawasan perbatasan pada dasarnya adalah egoism birokrasi.(10).

Sumberdaya untuk meningkatkan kapasitas suatu organisasi bisa dari dalam maupun dari luar. (11,12). Sumberdaya internal berasal dari kompetensi sumber daya manusia, anggaran, budaya organisasi, komunikasi, koordinasi dalam organisasi. Sedangkan sumber daya eksternal berasal dari kemampuan memanfaatkan sumber daya luar organisasi untuk mencapai tujuan bersama seperti membangun jaringan, kerjasama, kemitraan dan sebagainya. Sistem yang berlaku menjadi faktor berpengaruh kapasitas. Untuk itu, model kombinasi relasional dan atribut dapat menjadi alternative peningkatan kapasitas (13,14).

Persoalan manajerial dalam pengelolaan perbatasan terpusat pada masalah kelembagaan, pendekatan pembangunan dan integritas sumberdaya manusia, antara lain (a) ketidakjelasan kewenangan pengelolaan; (b) bersifat parsial, *ad hoc*, tidak terintegrasi, kurang terarah dan tidak terukur; (c) rendahnya keberpihakan (*affirmative action*) dari sektor terkait (15). Isu-isu tersebut menjadi salah satu *problem focus* dalam pengelolaan perbatasan negara, sehingga perlu penguatan kapasitas pengelola perbatasan dengan pilihan pendekatan pembangunan yang tepat dan dilaksanakan oleh personil yang memiliki integritas dan loyalitas tinggi.

Keterbatasan kapasitas BNPP dalam menjalankan tugas dan fungsi baik keterbatasan atribut (internal) dan keterbatasan koordinasi jaringan luar (eksternal) karena kewenangannya terbatas pada KISS (16). Apalagi kedudukan BNPP lembaga berada di bawah kementerian Dalam Negeri yang harus mengoordinasikan gubernur, bupati/walikota, kementerian lain yang memiliki kedudukan sama, lembaga-lembaga negara lain bahkan menteri koordinator. Aktor-aktor memiliki tugas dan fungsi masing-masing di satu sisi, namun harus

menyesuaikan diri dengan perencanaan dari BNPP. Ketidakpatuhan terhadap rencana BNPP juga tidak ada sanksi apapun.

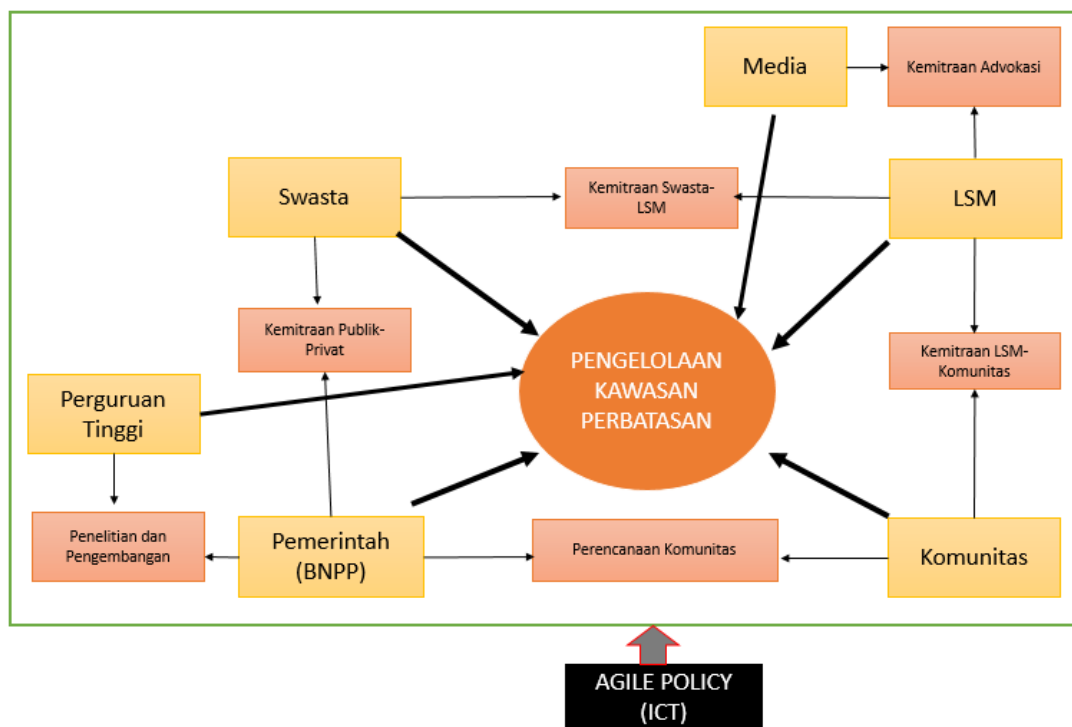
Rumusan Masalah:

Bagaimana fenomena dan kondisi eksisting kawasan perbatasan Kalimantan-Serawak? Apakah BNPP memiliki kapasitas yang memadai dalam pengelolaan kawasan perbatasan? Mengapa kemitraan multi-pihak berbasis ICT dapat meningkatkan kapasitas BNPP?

2. Pendekatan Dan Penyelesaian Masalah

Kedudukan dan kewenangan BNPP dalam pengelolaan kawasan perbatasan terbatas pada perencanaan, koordinasi, dan evaluasi. Implementasi teknis dimiliki oleh pihak eksternal kementerian/lembaga lain dan OPD Provinsi dan kabupaten. Selain itu, secara internal atribut yang dimiliki juga sangat terbatas seperti kompetensi SDM, anggaran, teknologi, komunikasi dan koordinasi.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, salah satu alternative yang ditawarkan adalah meningkatkan kapasitas BNPP, baik internal dan eksternal (kombinasi sumberdaya kapasitas). Pendekatan kemitraan multi-pihak dengan kebijakan *agile* memanfaatkan ICT dapat menjadi salah satu alternative. Karena sesuai tugas dan fungsi BNPP, pihak-pihak yang bermitra akan mengimplementasikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Kemitraan juga akan menimbulkan *burden-sharing* dalam pembiayaan pembangunan kawasan perbatasan.



Gambar 1: Model Pendekatan dan Solusi
Sumber: Peneliti, 2024

3. State of The Art dan Kebaruan

Kemitaraan multipihak menjadi salah satu cara alternatif yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan untuk pembangunan berkelanjutan (17). Dalam analisis multipihak, bukan sekedar mengidentifikasi peran para pihak namun juga harus memahami sifat dari kepentingan, kekuasaan, legitimasi dan keterkaitan satu sama lain (18). Kepentingan pihak hakikatnya sifat besaran keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari kemitraan. Kekuasaan pihak terkait dengan kemampuan menggunakan sumberdaya untuk suatu kegiatan. Kemitraan ingin mencapai tujuan praktis bersama, menggabungkan kompetensi inti, dan berbagi risiko, tanggung jawab, sumber daya, biaya dan manfaat (19). Perspektif kemitraan sebagai instrumen integratif (20) untuk memajukan tujuan tertentu, membuat proses menjadi lebih efektif, dan bertujuan memberikan rekomendasi.

Kapasitas adalah kemampuan untuk melakukan fungsi, memecahkan masalah, menyusun dan mencapai tujuan (21); kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif sehingga tujuan tercapai (22,23); kemampuan menyusun dan mengalokasikan sumber daya langka yang diperlukan untuk membuat pilihan kolektif yang cerdas tentang dan menetapkan arah strategis untuk tujuan public (24), fungsi “menganyam” pemerintahan modern, kemampuan menggabungkan berbagai organisasi dan kepentingan bersama untuk membentuk struktur kebijakan yang koheren (25). Jadi, kapasitas kebijakan sebagai kumpulan keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi kebijakan. (26)

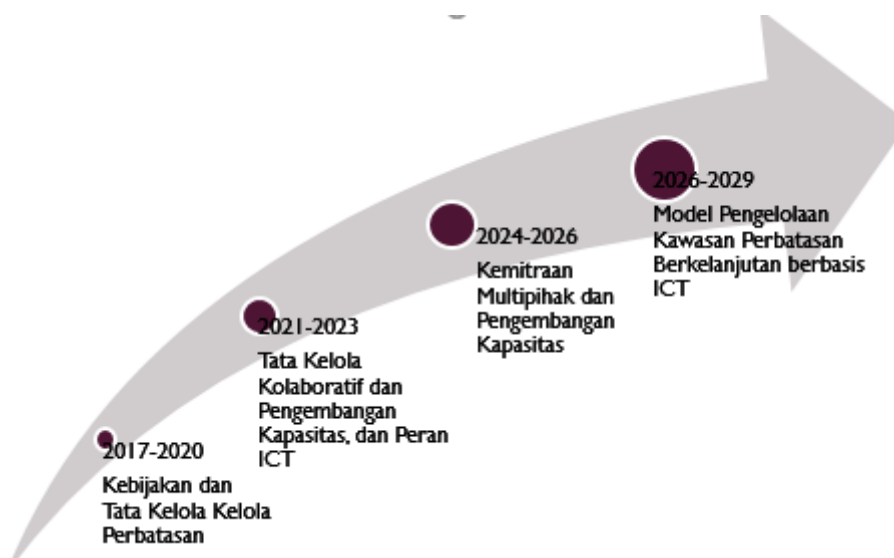
Agile (kelincahan, kegesitan) adalah kemampuan organisasi untuk bereaksi terhadap perubahan di lingkungannya lebih cepat daripada laju perubahan tersebut (27). *Agility* sebagai kemampuan untuk memenuhi misi dan mengubah keseluruhan proses organisasi secara efisien dan efektif dengan memanfaatkan kombinasi koordinasi, kekuatan, keseimbangan, dan peningkatan kecepatan dan kapasitas dengan penerapan teknologi canggih (28). Tata kelola digambarkan sebagai sekelompok kemampuan mengarahkan, berdasarkan tiga dimensi: (1) perencanaan strategis (2) kontrol dan (3) multi-keterampilan (29,30). Tata kelola yang agile tampaknya lebih fokus pada dimensi ketiga: mampu bereaksi terhadap perubahan di lingkungan organisasi sehingga tindakan pengarahan yang terkoordinasi dapat terjadi lebih cepat daripada laju perubahan.

Kebaruan penelitian ini adalah kemitraan multi-pihak dengan dukungan tata kelola yang *agile* yang memanfaatkan ICT dapat meningkatkan kapasitas

organisasi. Kombinasi sumber daya internal dan eksternal menjadi salah satu pendekatan baru peningkatan kapasitas organisasi.

4. Roadmad Penelitian

Ketua tim peneliti dan anggota tim memiliki pengalaman akademis dan empiris bidang pengembangan kapasitas, collaborative governance, dan ICT. Beberapa publikasi artikel dan hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian ini dapat pijakan untuk penelitian berikut(31–37). Dalam situasi globalisasi yang penuh gejolak, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambigu (38–40), agenda penelitian selanjutnya adalah model-model tata kelola kemitraan, adaptif dan agile (29) untuk mengatasi masalah-masalah di kawasan perbatasan.



Gambar 2: Peta Jalan Penelitian]

E. METODE

Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metode wajib dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Metode penelitian harus memuat sekurang-kurangnya prosedur penelitian, hasil yang diharapkan, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian. Metode penelitian harus sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

[1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan “*complex holistic picture in natural setting*”(41). Penelitian kualitatif setidaknya menguraikan 6 (enam) hal yaitu (a) mendalami makna tertentu, (b) memahami dan mendalami konteks tertentu, (c) mengidentifikasi fenomena yang belum diantisipasi (d) memahami proses yang terjadi di balik fenomena, (e) membangun penjelasan

kausalitas dan (f) mendeskripsikan pola-pola. (41,42)

Jenis penelitian ini adalah ekplanatif, karena akan menganalisis proses, konteks, pola dan kausalitas positif kemitraan multi-pihak dapat meningkatkan kapasitas BNPP dalam pengelolaan kawasan perbatasan Kalimantan. Selain itu, peranan dan makna ICT juga menjadi focus penelitian. Peneliti berusaha mengungkap meaning, argument, filosofi, dan latar belakang sebuah fakta (*context*), proses yang terjadi di balik fenomena, hubungan-hubungan kausalitas, pola-pola atau model atas fenomena hubungan kemitraan dengan kapasitas yang menjadi fokus penelitian ini.

2. Fokus Penelitian.

Penelitian ini akan berupaya mengatasi masalah kesenjangan antara kapasitas BNPP dengan kompleksitas masalah perbatasan. Fokus penelitiannya tentang kemitraan multi-pihak dapat dengan tata kelola yang agile dan memanfaatkan ICT dapat meningkatkan kapasitas BNPP dalam pengelolaan kawasan perbatasan di Kalimantan-Serawak. Secara lebih detail adalah untuk mendeskripsikan fenomena social, budaya, ekonomi, politik dan keamanan kawasan perbatasan Kalimantan dan kapasitas BNPP dalam perencanaan, koordinasi, dan evaluasi. Menganalisis makna kemitraan multi-pihak dengan mengidentifikasi para pihak dan perannya dalam pengelolaan perbatasan. Melakukan identifikasi manfaat ICT sebagai instrumen tata kelola yang *agile*. Menganalisis proses dan factor-faktor penyebab bahwa kemitraan multi-pihak dapat meningkatkan kapasitas BNPP dalam menjalankan fungsinya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kantor BNPP Jalan Kebon Sirih 31A, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu, kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga yang menjadi anggota BNPP sebanyak 32 Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian sesuai Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017. Sedangkan survei di kawasan perbatasan berada di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.



Gambar 3: Peta Kawasan Perbatasan Kalimantan
Sumber: regional.kompas.com

4. Teknik Pengumpulan Data

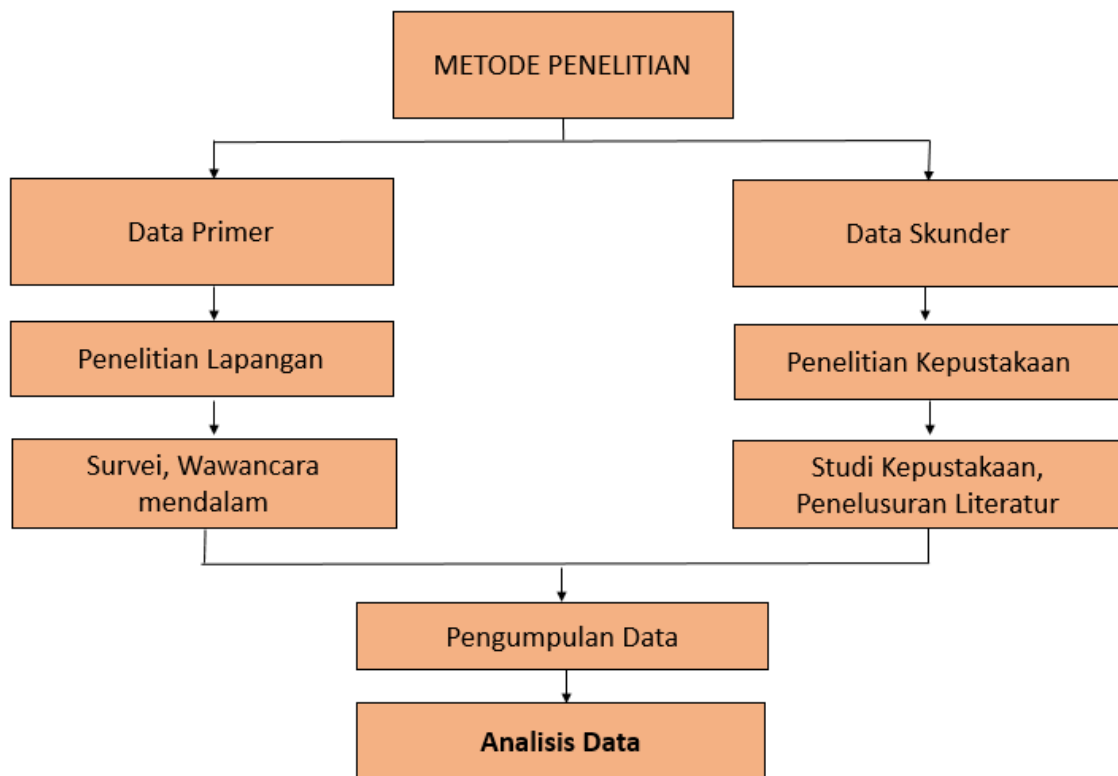
Obyek penelitian berupa domain-domain yang meliputi tempat, actor dan kegiatan. Konteks tempat terkait penelitian pengelolaan kawasan perbatasan Kalimantan Barat dan Utara, sementara BNPP berada di Jakarta. Pengumpulan data akan dilakukan dengan studi kepustakaan, survei, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan diskusi kelompok terarah.

a. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan Data Sekunder dilakukan dengan Studi Kepustakaan (studi dokumen) serta studi perbandingan, yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan, penelitian, dan literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikemukakan.

b. Penelitian Lapangan

Wawancara mendalam (in-dept interview) yakni dilaksanakan dengan bertatap muka langsung dengan informan penelitian. Dalam hal ini, instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, alat perekam, kamera, dan alat tulis. Tujuannya agar memperoleh data yang akurat terkait masalah penelitian. Informan sebanyak 30 orang berasal dari BNPP, anggota kementerian/lembaga non-kementerian, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi.



Gambar 3: Tahapan Penelitian
Sumber: Peneliti, 2024

5. Analisis Data

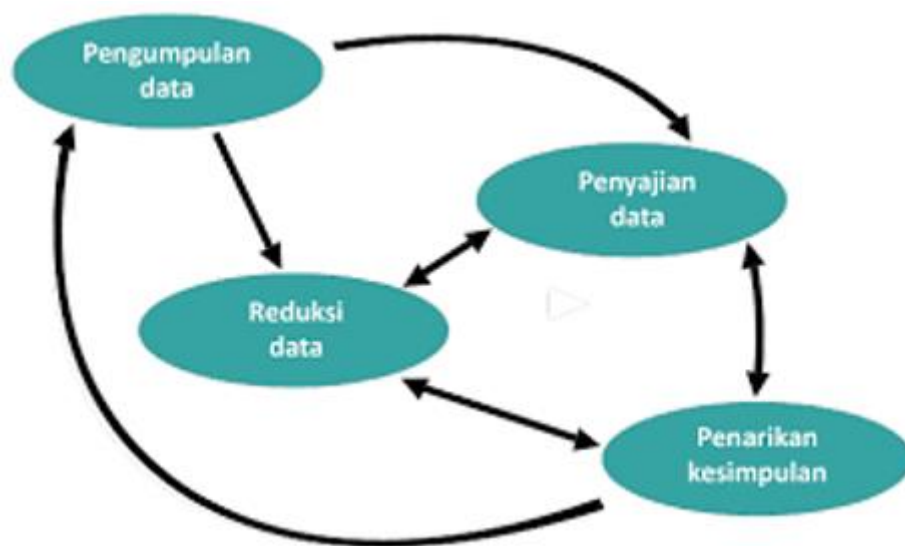
Secara lebih rinci data yang sudah dikumpulkan, baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, diolah dan dianalisis secara analisis kritis untuk menemukan hubungan kemitraan multi-pihak, pengembangan kapasitas BNPP, dan peran ICT dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Teknik analisis data dilakukan menurut model Mile, Huberman, dan Saldana.(43). Setelah pengumpulan data kualitatif, tahapan analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

Data Reduction yaitu mengurangi data agar sederhana dan relevan dengan kebutuhan. Data yang terlalu banyak, bahkan tsunami data akan menyulitkan analisis.

Display data yakni menyajikan data secara lebih menarik, rapi dan sistematis untuk memudahkan memahami hasil penelitian.

Conclusion drawing yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk yang lebih rapi.

Untuk mengetahui kesahihan atau validitas data, maka digunakan teknik triangulasi data. Setiap tahapan dalam analisis data selalu dicek antar tahapan guna menghindari bias data.



Gambar 4: Teknik Analisis Data
Sumber: Mile, Huberman & Saldana, 2014(43)

Tabel 1
Tujuan, Indikator, Teknik Pengumpulan Data

TUJUAN	INDIKATOR	Teknik Pengumpulan Data
Mendeskripsikan kondisi masyarakat	Kondisi ekonomi, social budaya, politik, keamanan, pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Dokumen • Wawancara mendalam • Observasi
Deskripsi Elemen Kapasitas BNPP	Level Individu: Jumlah SDM Kualifikasi SDM Sarana-Prasarana Pemanfaatan ICT	

	Level Organisasi: Struktur Organisasi Kepemimpinan Komunikasi dan koordinasi Anggaran Budaya kerja Level Sistem: Peraturan terkait Situasi Global Dukungan Masyarakat Jaringan kerja Kemitraan	
Identifikasi Multi-pihak	Pihak-pihak yang melakukan kemitraan dengan BNPP (pemerintah dan non-pemerintah) Relasi antar pihak-pihak	
Identifikasi Peran ICT	Pemanfaatan ICT dalam kemitraan Pemanfaatan ICT dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemanfaatan ICT untuk mendapatkan informasi Pemanfaatan ICT untuk pelayanan	
Analisis Kemitraan Multi-pihak meningkatkan kapasitas BNPP	Manfaat-manfaat kemitraan multi-pihak Tingkat ketercapaian program Tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat	

Sumber: Peneliti, 2024

Tabel 2
Tahapan Prosedur Penelitian

Tahapan Kegiatan	Prosedur	Hasil	Indikator	PIC
Persiapan				
Finalisasi Proposal	Diskusi dan revisi proposal	Proposal Penelitian	Sesuai panduan DRTPM	-Rusdiyanta
Perijinan	Membuat surat ijin penelitian ke BNPP	Dokumen Perijinan	Persetujuan ijin penelitian	-M. Nadhief -Septian
Literature Review	Mengumpulkan artikel dan buku untuk direview	Paradigma, teori, konsep yang relevan dengan masalah penelitian	Kebaruan penelitian	-Bambang P -Tulus Y -Samsinar -M. Nadhief -Septian

Desain Instrumen Penelitian	Mengidentifikasi dimensi dan indicator untuk menyusun panduan	Pedoman wawancara, pedoman survei, daftar masalah yang relevan	Tersusunnya pedoman wawancara dan survei	-Bambang P -Tulus Y -Samsinar
Pelaksanaan				
Wawancara Mendalam	Menghubungi informan, melakukan wawancara	Transkrip wawancara	Jelas, lengkap	-Rusdiyanta -Bambang P -Tulus Y -Samsinar
Pengumpulan data skunder	Mendatangi BNPP, BPPD, kementerian/lembaga terkait	Tersedianya data yang relevan	Lengkap, Jelas	-M. Nadhief -Septian
Survei	Melakukan visit ke kawasan perbatasan	Tersedianya data kondisi eksisting	Lengkap, Jelas	-Rusdiyanta -Bambang P -Samsinar
Pengolahan Data				
Reduksi Data	Melakukan klasifikasi dan pengurangan data yang tidak relevan	Tersedianya data yang relevan dan valid	Data yang relevan	-Rusdiyanta -Bambang P
Display data	Melakukan pembuatan table, grafik, gambar	Tersedianya data yang sudah dipaparkan (hasil)	Data disajikan menarik dan jelas	-Bambang P -Tulus Y -Samsinar
Penarikan kesimpulan	Melakukan interpretasi data	Tersedianya pembahasan dan diskusi	Menjawab masalah penelitian	-Rusdiyanta -Bambang P -Tulus Y -Samsinar
Pelaporan				
Penyusunan Laporan	Semua tim terlibat, sesuai kompetensinya	Tersusunnya laporan penelitian	Sesuai panduan DRTPM	-Rusdiyanta -Bambang P -Tulus Y -Samsinar
Diseminasi hasil penelitian	Penyusunan artikel oleh tim	Tersusunnya naskah artikel siap submit	Sesuai template jurnal yang dituju	-Rusdiyanta -Bambang P -Tulus Y
Diseminasi hasil penelitian	Penyusunan buku oleh tim	Tersusunnya naskah buku siap terbit	Sesuai template penerbit yang dituju	- Rusdiyanta -Tulus Y

2	Finalisasi Proposal												
3	Pra Pengamatan												
4	Pengurusan Ijin												
5	Review Literatur												
6	Penyusunan Pedoman Wawancara dan Pengamatan												
7	Wawancara mendalam												
8	Analisis data												
9	Penyusunan laporan												
10	Penulisan dan submit artikel												
11	Penulisan buku												
12	Pendaftaran HKI												
dst.													

Tahun ke-n

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
dst.													

]

G. DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

[

1. Gray B, Purdy J, Ansari S. Confronting Power Asymmetries in Partnerships to Address Grand Challenges. *Organ Theory*. 2022;3(2):263178772210987.
2. O'Leary, R.; Bingham LB. *The Collaborative Public Manager* [Internet]. Georgetown University Press. 2009.
3. O'Leary R, Van Slyke D, Kim S. *The future of public administration around the world : the Minnowbrook perspective*. Georg Univ Press. 2010;
4. Selsky JW, Parker B. Cross-sector partnerships to address social issues: Challenges to theory and practice. *Journal of Management*. 2005. p. 849–73.
5. Bryson JM, Crosby BC. The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature. *Public Adm Rev* [Internet]. 2006;(December):44–55.
6. Torfing J. Collaborative innovation in the public sector: the argument. *Public Manag Rev* [Internet]. Routledge; 2019;21(1):1–11. Available from: <https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1430248>
7. Clarke A, MacDonald A. Outcomes to Partners in Multi-Stakeholder Cross-Sector Partnerships: A Resource-Based View. *Bus Soc*. 2019;58(2):298–332.
8. Brinkerhoff JM. Assessing and improving partnership relationships and outcomes: a proposed framework. *Eval Program Plann*. 2002;25(3):215–31.
9. Saleh C, Hanafi I. *Kolaborasi Pemerintahan*. 1st ed. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka; 2020.
10. Arifin S. Cross Border Approach Sebagai Alternatif Model Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan. *J Huk IUS QUIA IUSTUM*. 2013;20(1):37–58.
11. Painter M, Pierre J. *Conclusions: Challenges to Policy Capacity*. Challenges

- to State Policy Capacity: Global Trends and Comparative Perspectives. Hampshire & New York: Palgrave Macmillan Ltd.; 2005.
12. Woo JJ. Capacity-building and Pandemics: Singapore's Response to Covid-19 [Internet]. 1st ed. Singapore: Palgrave Macmillan Ltd.; 2021. Available from: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-15-9453-3.pdf>
 13. Jayasuriya K. Capacity Beyond the Boundary: New Regulatory State, Fragmentation and Relational Capacity. In: Painter M, Pierre J, editors. Challenges to State Policy Capacity. 1st ed. Hampshire & London: Palgrave Macmillan; 2005. p. 19–37.
 14. Brenton S, Baekkeskov E, Hannah A. Policy capacity: evolving theory and missing links. Policy Stud [Internet]. 2022;1–19. Available from: <https://doi.org/10.1080/01442872.2022.2043266>
 15. Sumarsono S. Pembangunan Kawasan dan Manajemen Tasbara [Internet]. Jakarta: Kedeputan Batas Wilayah Negara, BNPP; 2012. Available from: <http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0616/2003615367-d.html>
 16. Widiartana PW. Kedudukan dan Kewenangan: Badan Nasional. J Huk dan Pembang. 2021;51(1).
 17. Banerjee A, Murphy E, Walsh PP. Perceptions of multistakeholder partnerships for the sustainable development goals: A case study of Irish non-state actors. Sustain. 2020;
 18. Lawrence A, Weber J, Vanessa HD, Wasieleski DM. Business and Society: Stakeholders, Ethics, Public Policy. 2023.
 19. Gray B, Purdy JM. Collaborating for Our Future: Multistakeholder Partnerships for Solving Complex Problems. Oxford: Oxford University Press; 2018.
 20. Wayne Meek J. Introduction: collaborative public management as an emergent field. Handbook of Collaborative Public Management. 2021. p. 1–15.
 21. Fukuda-Parr S, Lopes C, Malik K. Capacity for Development: New Solutions to Old Problems. 1st ed. London: UNDP & Earthscan Publications Ltd; 2002.
 22. Grindle MS. Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries. Boston: Harvard Institute for International Development; 1997. 496 p.
 23. Wu X, Ramesh M, Howlett M. Policy Capacity: Assessing Governmental Competences and Capabilities in Theory and Practice. Palgrave Macmillan; 2018. 456 p.
 24. Wu X, Ramesh M, Howlett M. Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. Policy Soc. 2015;34(3-4):165–71.
 25. Howlett M, Ramesh M, Perl A. Studying Public Policy: Principles and Processes. 4th ed. Oxford: Oxford University Press; 2020.
 26. Kekez A, Howlett M, Ramesh M. Varieties of collaboration in public service delivery. Policy Des Pract [Internet]. Routledge; 2018;1(4):243–52. Available from: <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1532026>
 27. Luna AJH d. O, Marinho MLM, de Moura HP. Agile governance theory: operationalization. Innov Syst Softw Eng [Internet]. Springer London; 2020;16(1):3–44. Available from: <https://doi.org/10.1007/s11334-019-00345-3>
 28. Hong KP, Kim PS. Building an agile government: Its possibilities, challenges, and new tasks. Halduskultuur. 2020;21(1):4–21.
 29. Luna AJH de O, Kruchten P, de Moura HP. Agile Governance Theory: conceptual development. In: Sakata DMG, editor. 12th International Conference on Management of Technology and Information Systems [Internet]. São Paulo: FEA-USP; 2015. Available from:

- <http://arxiv.org/abs/1505.06701>
30. J.H.de O.Luna A, Kruchten P, E.Pedrosa MLG do, Almeida Neto HR d., Moura HP d. M. State of the Art of Agile Governance: A Systematic Review. *Int J Comput Sci Inf Technol*. 2014;6(5):121–41.
 31. Rusdiyanta & Bambang pujiyono. Asymmetric Policy of Border Area Development in Indonesia (JokoWidodo-JusufKalla Government Period). *Int J Pure Appl Math [Internet]*. 2017;117(15):945–54. Available from: <http://www.ijpam.eu>
 32. Rusdiyanta. Collaborative Border Management as the Strategic Revitalization of State Border Management in Indonesia. *Int J Pure Appl Math [Internet]*. 2017;116(Special Issue):415–26. Available from: <http://www.ijpam.eu>
 33. Rusdiyanta. Penguatan Kapasitas Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BP2DT) Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat [Internet]. Diponegoro; 2018. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-849873-6.00001-7>
 34. Pujiyono B, Kismartini, Yuwono T, Dwimawanti IH. Stakeholder analysis on tourism collaborative governance in Tanjung Lesung tourism, Pandeglang Regency, Banten Province, Indonesia. *African J Hosp Tour Leis*. 2019;8(3).
 35. Pujiyono B. KOLABORASI MULTI AKTOR DALAM PENGELOLAAN WISATA GEO PARK BELITUNG. *REFORMASI*. 2022;12(1):95–104.
 36. Kismartini K, Pujiyono B. Dynamic Capabilities in Collaboration Based Management of GeoPark in Bangka Belitung, Indonesia. *J Tour Dev*. 2023;41:79–94.
 37. Samsinar S, Fatimah T, Sakti DVSy, Ariyani PF. Pengembangan Kapasitas Teknologi Informasi Pegawai Kanwil DJP Jakarta Selatan II Melalui Pelatihan Ms. Excel Tingkat Dasar. *J Karya Abdi Masy*. 2021;4(3):643–9.
 38. Bennett N, Lemoine GJ. What a difference a word makes: Understanding threats to performance in a VUCA world. *Bus Horiz*. 2014;57(3):311–7.
 39. Bourne M. Performance measurement and management in a VUCA world. *Int J Prod Res [Internet]*. Taylor & Francis; 2021;59(24):7311–6. Available from: <https://doi.org/10.1080/00207543.2021.2004042>
 40. Dhillon R, Nguten Q. Strategies to respond to a VUCA world. 2020;2–83.
 41. Creswell JW, Creswell JD. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Californian, London & Singapore: SAGE Publications Ltd; 2018.
 42. Denzin NK, Lincoln YS. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. 5th ed. Los Angeles, London, New Delhi: SAGE Publications Inc.; 2018.
 43. Mile MB, Huberman MA, Saldana J. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Los Angeles: SAGE Publications Inc.; 2014.



PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PENELITIAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Rusdiyanta
NIDN : 0317076801
Instansi : Universitas Budi Luhur

Sehubungan dengan Kontrak Penelitian:

Tanggal Kontrak Induk* : 11 Juni 2024
Nomor Kontrak Induk* : 105/E5/PG.02.00.PL/2024
Tanggal Kontrak Turunan** : 26 Juni 2024, 27 Juni 2024
Nomor Kontrak Turunan** : 788/LL3/AL.04/2024, A/UBL/DRPM/000/066/06/24
Judul Penelitian : Kemitraan Multipihak Berbasis ICT Sebagai Strategi Pengembangan Kapasitas Badan Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kalimantan
Tahun Usulan : 2024
Tahun Pelaksanaan : 2024
Jangka Waktu Penelitian : 1 tahun
Periode Penelitian : Tahun ke 1 dari 1 tahun*
Dana Penelitian :

Periode	Dana Penelitian (Rp)	Dana Tambahan (Rp)
Tahun ke-	112.180.000	0

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan penelitian serta mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut diatas.



Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 23 Juni 2024



(Rusdiyanta)

Keterangan:

*diisi tanggal dan nomor Kontrak Induk antara DRTPM Kemdikbudristek dengan LP/LPPM Perguruan Tinggi Negeri atau LLDIKTI

**Kontrak Turunan:

- Untuk Perguruan Tinggi Negeri diisi tanggal dan nomor kontrak antara LP/LPPM Perguruan Tinggi dengan Peneliti
- Untuk Perguruan Tinggi Swasta diisi tanggal dan nomor kontrak LLDIKTI dg PTS dan PTS dengan Peneliti yang dipisahkan dengan tanda koma (,)

PERSETUJUAN PENGUSUL

Tanggal Pengiriman	Tanggal Persetujuan	Nama Pimpinan Pemberi Persetujuan	Sebutan Jabatan Unit	Nama Unit Lembaga Pengusul
30/03/2024	30/03/2024	PRUDENSIUS MARING	Direktur	Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Komentar : Disetujui

Disetujui
